



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : NOFIANSYAH
2. Jabatan : KEPALA KANTOR WILAYAH
3. NHK : 434077

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 3.250.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 78 m2/140 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA UTARA , HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 160 m2/120 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 2.250.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 922.500.000

1. MOBIL, MERCEDES BENZ W204 Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 230.000.000
2. MOTOR, ROYAL ENFIELD CLASSIC 350CC Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
3. MOBIL, MITSHUBISHI PAJERO Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 590.000.000
4. MOTOR, PIAGIO SPRINT Tahun 1968, HASIL SENDIRI Rp. 12.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 1.484.660.000

D. SURAT BERHARGA Rp. 544.236.953

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 1.744.337.675

F. HARTA LAINNYA Rp. 620.116.642

Sub Total Rp. 8.565.851.270

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 8.565.851.270



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **BONO YUDIANTO**
2. Jabatan : **KEPALA BIDANG LELANG**
3. NHK : **111499**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 955.000.000

1. Tanah Seluas 392 m2 di KAB / KOTA BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 168 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA MEDAN , HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
3. Tanah Seluas 153 m2 di KAB / KOTA DELI SERDANG, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 92 m2/72 m2 di KAB / KOTA KOTA MEDAN , HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 239.900.000

1. MOBIL, TOYOTA RUSH 1,5 S M/T Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
2. MOTOR, HONDA ADV 160 CC - N1N02Q43L1 A/T Tahun 2025, HASIL SENDIRI Rp. 39.900.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 703.337.000

D. SURAT BERHARGA Rp. 60.552.000

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 304.823.961

F. HARTA LAINNYA Rp. 149.000.000

Sub Total Rp. 2.412.612.961

III. HUTANG Rp. 26.067.590

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 2.386.545.371



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ISTINA SETYA LESTARI
2. Jabatan : KEPALA BIDANG PENILAIAN
3. NHK : 112405

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	2.242.550.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 92 m2/48 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 131 m2/92 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 1.642.550.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	140.000.000
1. MOBIL, HONDA FREED MINIBUS Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 140.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	130.133.958
D. SURAT BERHARGA	Rp.	14.000.000
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	737.374.431
F. HARTA LAINNYA	Rp.	14.000.000
Sub Total	Rp.	3.278.058.389
III. HUTANG	Rp.	414.246.573
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.863.811.816

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan



Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : JUNDI WIDIANTORO
2. Jabatan : KEPALA BAGIAN UMUM
3. NHK : 62547

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	160.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/40 m2 di KAB / KOTA KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	180.000.000
1. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000		
2. MOBIL, MITSUBISHI XPANDER Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	35.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	203.007.100
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	186.945.232
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	764.952.332
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	764.952.332

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan



Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : RIZCKA ADHITAMA NASUTION
2. Jabatan : KEPALA BIDANG PIUTANG NEGARA
3. NHK : 111901

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 621.500.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 144 m2/58 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
2. Tanah Seluas 170 m2 di KAB / KOTA KUBU RAYA, HASIL SENDIRI Rp. 21.500.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 255.500.000

1. MOBIL, DAIHATASU ALL NEW XENIA Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 225.000.000
2. MOTOR, HONDA PCX Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 23.000.000
3. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 7.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 91.511.100

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 12.206.365

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 980.717.465

III. HUTANG Rp. 175.460.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 805.257.465

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SUTARNO
2. Jabatan : KEPALA BIDANG KEPATUHAN INTERNAL, HUKUM, DAN INFORMASI
3. NHK : 789860

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	600.000.000
1. Tanah Seluas 668 m2 di KAB / KOTA GUNUNG KIDUL, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	394.000.000
1. MOBIL, TOYOTA AVANZA 1.5S Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000		
2. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000		
3. MOTOR, HONDA SUPRA X 125 Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000		
4. MOTOR, KAWASAKI NINJA 250 Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000		
5. MOTOR, HONDA X1H02N32L1 A/T (VARIO) Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000		
6. MOBIL, TOYOTA YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 3 AIR BAGS Tahun 2024, HIBAH TANPA AKTA Rp. 300.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	17.250.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	197.313.200
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	49.007.486
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.257.570.686



III. HUTANG

Rp. 376.143.225

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 881.427.461

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : YUDI SANTOSO
2. Jabatan : KEPALA BIDANG PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA
3. NHK : 683404

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	750.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 70 m2/62 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	238.500.000
1. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2019, HADIAH Rp. 8.500.000		
2. MOBIL, BMW E46 Tahun 2001, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000		
3. MOBIL, WULING AIR EV Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	52.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	360.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.400.500.000
III. HUTANG	Rp.	50.500.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.350.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan



Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.